



PENINGKATAN LITERASI CORE TAX UNTUK PENGELOLA BUMDES: STRATEGI MENUJU TATA KELOLA YANG TAAT PAJAK DAN AKUNTABEL

Ahmad Dahlan^{1*}, Tri Cicik Wijayanti², Sri Hastuti³, Yosar Haritsar⁴, Dadieng Kurniawan⁵, Yeni Tata Rini⁶, Dekki Umamur Ra'is⁷

^{1,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajayana Malang

²Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Gajayana Malang

⁷Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

*Penulis Korespondensi: achmaddahlan@unigamalang.ac.id

Abstract. *The main challenge faced by Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wagir District, Malang Regency, is the low level of tax literacy (core tax) among managers, which risks legal violations and hampers transparent and accountable financial governance. This community service aims to enhance BUMDes managers' knowledge and skills in understanding and fulfilling tax obligations through training based on Core Tax System technology simulations. The methodology involves participatory training with direct simulations, engaging all BUMDes managers as the population and active workshop participants, preceded by needs assessment, module development, and pre-test/post-test evaluation. The results demonstrate a significant increase in participants' tax literacy scores and practical abilities, with the tax compliance rate rising from 38% to 92% within three months after the training. The program also led to the formation of internal tax teams and reduced incidents of incorrect or late tax reporting. The main recommendation is to replicate this training model in other regions and strengthen digital assistance to support good governance in BUMDes in the digital era. This initiative has proven effective in reinforcing sustainable and tax-compliant village financial management.*

Keywords: *Tax Literacy, Bumdes, Core Tax, Digital Training, Governance*

Abstrak. Permasalahan utama yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, adalah rendahnya literasi perpajakan (core tax) di kalangan pengurus, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan menghambat tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDes dalam memahami serta mengimplementasikan kewajiban perpajakan melalui pelatihan berbasis simulasi teknologi Core Tax System. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif dengan simulasi langsung, melibatkan seluruh pengurus BUMDes sebagai populasi dan peserta aktif dalam workshop, didahului asesmen kebutuhan, penyusunan modul, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor literasi pajak dan kemampuan praktis peserta, dengan tingkat kepatuhan pelaporan pajak naik dari 38% menjadi 92% dalam tiga bulan pasca pelatihan. Program ini juga mendorong pembentukan tim pajak internal dan menurunkan kasus pelaporan pajak yang keliru atau terlambat. Rekomendasi utama adalah replikasi model pelatihan ini di wilayah lain dan penguatan pendampingan digital untuk mendukung good governance pada BUMDes di era digital. Kegiatan ini terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang taat pajak dan berkelanjutan.

Kata kunci: Literasi Pajak, Bumdes, Core Tax, Pelatihan Digital, Tata Kelola

LATAR BELAKANG

Badannya Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kemandirian desa di Indonesia pasca

diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal, BUMDes berkontribusi signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan penyediaan lapangan kerja. Namun, di tengah peluang besar tersebut, pengelolaan keuangan dan aspek perpajakan menjadi tantangan krusial yang belum sepenuhnya diatasi. Minimnya pemahaman pengelola BUMDes terhadap kewajiban perpajakan (core tax) berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hukum, kesalahan administrasi, serta dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (Handajani, et al., 2021).

Literasi pajak merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola keuangan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Nasution & Purnamasari, 2023). Kondisi terkini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes, khususnya di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, masih menghadapi kendala dalam memahami jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi, prosedur pelaporan, serta penggunaan aplikasi digital Core Tax System yang mulai diterapkan Direktorat Jenderal Pajak. Ketidaksiapan ini bukan hanya menghambat kepatuhan pajak, tetapi juga membuka peluang terjadinya sanksi dan masalah hukum yang dapat merusak reputasi dan efektivitas BUMDes.

Oleh karena itu, peningkatan literasi core tax melalui pelatihan berbasis simulasi teknologi dan praktik langsung menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan kapasitas pengelola BUMDes tidak hanya akan mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan (Larasati, et al., 2025). Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan pengurus BUMDes mampu memahami dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan secara benar, sehingga BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi desa yang taat hukum dan terpercaya.

KAJIAN TEORITIS

Fenomena rendahnya literasi perpajakan di kalangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa secara profesional dan akuntabel (Rinaldi, et al., 2025). Berdasarkan data dan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), banyak BUMDes yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk jenis pajak

yang harus dipenuhi, cara pelaporan, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan dan pendampingan yang sistematis bagi pengurus BUMDes, khususnya di wilayah perdesaan yang akses informasi dan teknologi digitalnya terbatas (DJP, 2023). Oleh karena itu, permasalahan literasi pajak ini menjadi titik fokus strategis untuk diperbaiki agar BUMDes dapat mematuhi regulasi perpajakan dan menghindari potensi sanksi.

Inspirasi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga didasari oleh perkembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, khususnya penerapan Core Tax System oleh DJP yang mengintegrasikan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara digital. Sistem ini menawarkan kemudahan sekaligus menuntut pengelolaan data yang akurat dan pemahaman teknis yang memadai dari pengelola BUMDes. Namun, transformasi digital ini menghadirkan tantangan serius bagi pengurus BUMDes yang memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan teknologi yang beragam. Oleh karena itu, pelatihan berbasis simulasi teknologi menjadi metode efektif untuk menjembatani gap pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan secara optimal (Baker & Jenney, 2022).

Selain aspek teknis, pengabdian ini juga terinspirasi oleh pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang berlandaskan prinsip good governance. Studi akademik menunjukkan bahwa literasi pajak yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes serta mendukung keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan (Kustiningsih, 2022). Dengan demikian, peningkatan literasi core tax bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga berperan sebagai pilar strategis dalam mendorong profesionalisme dan integritas pengelolaan BUMDes di tingkat desa.

METODE KEGIATAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah Simulasi Ipteks (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) berbasis pelatihan partisipatif. Kegiatan dimulai dengan asesmen kebutuhan (needs assessment) melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama seluruh pengurus BUMDes di Kecamatan Wagir. Selanjutnya, penyusunan modul pelatihan core tax yang meliputi materi tentang jenis pajak BUMDes, tahapan pelaporan, konsekuensi hukum, serta praktik penggunaan aplikasi Core Tax System.

Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif dan simulasi langsung aktivasi serta input data pada aplikasi Core Tax. Peserta dilatih untuk melakukan registrasi, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), serta mengakses fitur analisis kepatuhan pajak. Metode ini dipilih karena efektif untuk menjembatani gap antara teori dan praktik, serta mempercepat proses internalisasi keterampilan digital (Rinaldi, et al., 2025).

Seluruh proses dievaluasi melalui pre-test dan post-test literasi pajak, serta observasi langsung pada saat simulasi. Umpan balik peserta dihimpun untuk mengetahui kendala lapangan dan potensi replikasi kegiatan di wilayah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya Utama

Karya utama dari program pengabdian ini adalah Model Literasi Core Tax Berbasis Digital yang mengintegrasikan:

1. Simulasi aktivasi dan pelaporan pajak melalui aplikasi Core Tax System
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) internalisasi tata kelola pajak di lingkungan BUMDes
3. Panduan penyelesaian masalah-masalah umum dalam pelaporan digital

Model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelatihan, tetapi juga sebagai living document yang dapat diperbaharui sesuai perkembangan regulasi dan teknologi perpajakan. Model ini secara langsung diterimakan kepada pengelola BUMDes sebagai solusi untuk mengurangi risiko pelanggaran, meningkatkan transparansi, dan memperkuat legitimasi kelembagaan di mata publik maupun pemerintah.

Keunggulan

1. Keunggulan

Model ini bersifat adaptif terhadap perkembangan sistem perpajakan nasional, mudah direplikasi di BUMDes lain, dan kompatibel dengan kebijakan DJP. Simulasi langsung meningkatkan retention keterampilan dan keberanian peserta menghadapi rutinitas pelaporan pajak digital. SOP internalisasi memudahkan transisi pengetahuan antar pengurus BUMDes, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan.

2. Kelemahan

Tingkat literasi digital yang bervariasi menyebabkan beberapa pengurus masih membutuhkan pendampingan lanjutan. Keterbatasan akses internet di sejumlah desa menjadi tantangan tersendiri, terutama pada proses aktivasi sistem daring.

3. Peluang

Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan coaching clinic berkala secara daring, serta integrasi dengan aplikasi keuangan desa (misal, Siskeudes). Adopsi model ini sangat strategis untuk memperkuat daya saing BUMDes di era digital dan membangun ekosistem tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan prinsip good governance.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan literasi core tax bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengelola kewajiban perpajakan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor literasi pajak peserta dari pra-pelatihan ke pasca-pelatihan, serta kemampuan praktis dalam mengoperasikan aplikasi Core Tax System secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa metode simulasi ipteks yang diterapkan mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan digital, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan BUMDes yang taat pajak dan akuntabel.

Lebih jauh, kesesuaian antara kebutuhan pengelola BUMDes dengan metode pelatihan yang diimplementasikan menegaskan relevansi dan ketepatan intervensi pengabdian ini. Dengan meningkatnya literasi perpajakan, BUMDes tidak hanya terhindar dari risiko sanksi hukum, tetapi juga mampu membangun reputasi kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program peningkatan literasi core tax ini sangat strategis untuk direplikasi di wilayah lain sebagai upaya mendukung profesionalisme dan kemandirian ekonomi desa dalam era digitalisasi perpajakan.

Kegiatan ini membawa dampak langsung pada perubahan perilaku dan budaya kerja pengelola BUMDes dalam aspek tata kelola keuangan. Indikator kinerja utama yang tercapai adalah:

1. Meningkatnya kemampuan pengurus melakukan pelaporan pajak tepat waktu dan benar (compliance rate naik dari 38% ke 92% dalam tiga bulan pasca pelatihan).
2. Adanya pembentukan tim pajak internal pada dua BUMDes sebagai bentuk keberlanjutan praktik baik.
3. Penurunan kasus pelaporan pajak yang keliru atau terlambat, yang sebelumnya sering terjadi akibat minimnya pemahaman aplikasi Core Tax.
4. Terjadi perbaikan reputasi BUMDes di mata pemerintah daerah dan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya kepercayaan dalam pengelolaan dana desa dan peluang kerjasama bisnis baru.

Penguatan literasi core tax tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola dan akuntabilitas sektor riil ekonomi perdesaan.

DAFTAR REFERENSI

- Baker, E., & Jenney, A. (2022). Virtual Simulations to Train Social Workers for Competency-Based Learning: A Scoping Review. *Journal of Social Work Education*, 59, 8 - 31. <https://doi.org/10.1080/10437797.2022.2039819>.
- Handajani, L., A., Muhsyaf, S., & Sokarina, A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i4.1127>.
- Kustiningsih, N. (2022). ANALYSIS OF FINANCIAL DIGITALIZATION ON BUMDES AS A KNOWLEDGE-BASED VIEW PERSPECTIVE: (Case of Bumdes Bumirejo, Dampit, Malang Regency). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i6.1414>.
- Larasati, I., Mulyono, R., Pratiwi, R., & Putri, R. (2025). Menelusuri Rekam Pajak: Pelatihan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukorambi Di Kabupaten Jember. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v5i4.873>.
- Nasution, W., & Purnamasari, D. (2023). The effect of tax knowledge and taxpayer awareness on BUMDes taxpayer compliance. *Journal of Business and Information Systems* (e-ISSN: 2685-2543). <https://doi.org/10.36067/jbis.v5i2.150>.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan dan Pajak sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes serta UMKM Desa. *GIAT Teknologi untuk Masyarakat*, 4(2), 131-140.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan dan Pajak sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes serta UMKM Desa. *GIAT Teknologi untuk Masyarakat*, 4(2), 131-140.